PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

PREPARED FOR

SAKIP 2024

ADDRESS

Jl. Pulau Bangka, Padang Baru
Telp. (0717) 9111513
www.ptun-pangkalpinang.go.id

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru
Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telp. : (0717) 9111513 ; e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id ; website: ptun-pangkalpinang.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pangkalpinang, 16 Februari 2024
Ketua Tim Pereviu LKjIP,

Boby Cahyadi, S.H.
NIP. 197711271999031003

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√ (Hal 18)
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√ (Hal 21)
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari	√

		dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Pangkalpinang, 16 Februari 2024
Ketua Tim Pereviu LKjIP,

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Boby Cahyadi, S.H.
NIP. 197711271999031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya, maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pangkalpinang, 16 Februari 2024

Ketua,

Roni Erry Saputro, S.H., M.H.

NIP. 19770628 200112 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkalpinang Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 2020–2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP PTUN Pangkalpinang Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance,* Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG YANG AGUNG"

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersediannya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang maka dirumuskan tujuan strategis organisasi yang diharapkan dapat dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran *pertama* adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; *Kedua* adalah Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara; *Ketiga* adalah Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan; dan *Keempat* adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja dan 8 target kinerja yang telah direviu

menjadi 7 indikator kinerja dan 7 target kinerja, yang mana target ini juga merupakan target yang harus dicapai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum, target yang telah ditetapkan di Tahun 2023 berhasil dicapai dengan nilai kinerja yang baik.

Nilai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 secara rata-rata adalah sebesar **100,62%**. Nilai 100,62% ini menunjukkan capaian kinerja yang baik dan selaras dengan kualitas perencanaan yang baik. Nilai kinerja untuk tiap-tiap indikator juga menunjukkan capaian minimal 100%.

Jika dibandingkan dengan nilai kinerja pada Tahun 2022, yakni sebesar 156,62%, nilai capaian pada Tahun 2023 sekilas terlihat menurun. Namun, hal ini dikarenakan capaian kinerja Tahun 2022 terlalu tinggi melampaui targetnya dikarenakan tidak dilakukannya reviu atas target kinerja di Tahun 2022. Setelah dikaji, nilai 156,62% ini terlalu besar melampaui target dengan nilai per sasaran adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 146,5%, 2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100%, 3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan sebesar 316,5%, dan 4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan sebesar 62,5%.

Oleh karenanya, di Tahun 2023, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan, dan dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dilakukan reviu/revisi atas target. Reviu atas target di Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 21 November 2023 yang didokumentasikan dalam notulen rapat.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis di Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Pencapaian Kinerja Keseluruhan

No.	Sasaran Strategis	Capaian(%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	**102,5%**
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	**100%**
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan	**100%**
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**100%**
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan		**100,62%**

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 adalah sebesar **102,5%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 2.

Tabel 2.

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	**100%**
b.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	60%	63,63%	**106,05%**
c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	81,81%	**102,26%**
d.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	90%	91,55%	**101,72%**
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				**102,5 %**

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 3.

Tabel 3.
Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	**100 %**
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				**100 %**

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 4.

Tabel 4.
Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	**dihapus**		
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	**100%**
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				**100%**

Pada Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Terpinggirkan, Indikator "Persentase perkara Prodeo yang Diselesaikan" dihapus dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di awal tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menargetkan "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" sebesar 100%, namun kemudian, pada tanggal 21 November 2023 dilakukan Reviu Ke II atas

Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Aksi 2023 menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III di mana nilai capaian kinerja untuk indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak dapat didefinisikan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk hingga mendekati akhir tahun, sehingga perlu dilakukan reviu atau revisi atas indikator dimaksud dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas target indikator lainnya yang telah melebihi target.

Karena Indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" sudah dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak diperhitungkan dalam perhitungan nilai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023.

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 adalah sebesar **100%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel 5.

Tabel 5.

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	**Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**	**100%**	**N/A**	**100%**

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020-2024.

DAFTAR ISI

Halaman

Pernyataan Telah Direviu..... i

Formulir Check List Reviu..... ii

Kata Pengantar..... iv

Ikhtisar Eksekutif..... v

Daftar Isi xi

Daftar Tabel xiii

Daftar Gambar xv

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang..... 1

B. Kedudukan dan fungsi..... 3

C. Struktur Organisasi..... 5

D. Isu Strategis..... 10

E. Sistematika Penyajian..... 10

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis 2020-2024..... 12

1. Visi..... 12

2. Misi..... 13

3. Tujuan..... 13

4. Sasaran Strategis..... 14

5. Program Utama dan Kegiatan 14

B. Rencana Kinerja Tahun 2023..... 15

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 18-19

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 20

B. Realisasi Anggaran..... 52

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan..... 54

B. Rekomendasi..... 55

Lampiran

1. SK Tim Penyusunan LkjIP 56
2. Struktur Organisasi..... 60
3. Indikator Kinerja Utama..... 61
4. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024..... 70
5. Pengukuran Kinerja..... 74
6. Penghargaan yang Diterima..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.Pencapaian Kinerja Keseluruhan viii

Tabel 2. Sasaran Strategis I viii

Tabel 3. Sasaran Strategis II ix

Tabel 4. Sasaran Strategis III ix

Tabel 5. Sasaran Strategis IV x

Tabel 6. Profil ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 6-8

Tabel 7. Profil Tenaga PPNPN 9

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahun 2023 15

Tabel 9. Reviu Ke I Rencana Kinerja Tahun 2023 16-17

Tabel 10. Reviu Ke II Rencana Kinerja Tahun 2023 18

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 19

Tabel 12.Capaian Kinerja Tahun 2023 21-22

Tabel 13.Capaian Kinerja Utama Sasaran I 23

Tabel 14.Keadaan Perkara Tingkat Pertama 24

Tabel 15.Laporan Perkara Putus Tahun 2023 25

Tabel 16.Keadaan Perkara Tingkat Banding 27

Tabel 17.Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 27

Tabel 18.Keadaan Perkara Kasasi.....28

Tabel 19.Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....29

Tabel 20.Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023.....30-31

Tabel 21.Capaian Kinerja Utama Sasaran II.....32

Tabel 22.Capaian Kinerja Utama Sasaran III.....33

Tabel 23.Capaian Kinerja Utama Sasaran IV.....36

Tabel 24.Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan.....38

Tabel 25.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....41-49

Tabel 26.IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi.....50

Tabel 27.IKPA DIPA 05 Dirjen Badilmiltun.....51

Tabel 28.Realisasi Anggaran DIPA 01.....52

Tabel 29.Realisasi Anggaran DIPA 05.....52

Tabel 30.Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023.....53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PTUN Pangkalpinang 5

Gambar 2. Grafik Keadaan Perkara Tingkat Pertama 25

Gambar 3. Penghargaan yang Diterima Selama Tahun 2023 75

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Pangkalpinang, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada "Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selaku kawal depan Mahkamah Agung *(voorpost)* di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, meliputi Provinsi Bangka Belitung.

Secara umum kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan tingkat pertama yang bersifat administrasi, keuangan dan organisasi.

B. Kedudukan dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya beralamat di Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Prov. Kep. Bangka Belitung. Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum.

Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama,* sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan pimpinan pengadilan dan didampingi seorang Wakil Ketua, guna pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan secara tertib demi menunjang kelancaran penyelenggaraan peradilan, ditetapkan adanya kepaniteraan yang menangani administrasi perkara dipimpin seorang Panitera dan kesekretariatan yang menangani administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Kepaniteraan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas seorang Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepaniteraan mempunyai fungsi: menyusun kegiatan pelayanan administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi putusan perkara, statistik perkara dan dokumentasi perkara.

Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan yang semua sub-sub berfungsi untuk melakukan urusan perencanaan, pelaporan, kepegawaian, urusan keuangan dan urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga serta mengelola perpustakaan peradilan.

C. Struktur Organisasi

KETUA
Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
-

HAKIM
1. Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H.
2. Febriansyah Rozarius, S.H.

KETERANGAN :
: Garis Bantu
: Garis Koordinasi
(*) : Diperbantukan

PANITERA
Boby Cahyadi, S.H.

PANITERA MUDA PERKARA
Lezi Fitri, S.H.

STAF
1. Mohammad Soleh, S.H.
2. Fanny Naurita, S.H.
3. Fani Melisa Mega Putri Sembiring A.Md (*)

PLT. PANITERA MUDA HUKUM
Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.

STAF
1. Jonathan Santoso, S.H. (*)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. Panitera Pengganti :
   - Zulham Idrus, S.Kom., S.H., M.H.
   - Jonathan Santoso, S.H.
2. Jurusita/ Jurusita Pengganti
3. Pranata Peradilan

SEKRETARIS
Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.

KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
Rosalina, S.E

STAF
1. Yulita Ida Lestari, S.Kom (JF Ahli Pertama)
2. Fani Melisa Mega Putri S. A.Md

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Dendy Prasetya, S. Psi.

STAF
-

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
Muhammad Agus, S.E., M.Si.

STAF
1. Fanny Ruspanji, S.E.I

HONORER
1. Imelia Kontesa
2. Indah Kusumawati
3. Roli
4. Feri
5. Agi Munawansyah
6. Fajar Hidayat, S.Ag

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tata Usah Negara Pangkalpinang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala sub bagian, yaitu Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubag Perencanaan, Teknologi Infromasi dan Pelaporan.

Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang beserta jabatannya hingga 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PROFIL	BIODATA		
1.		Nama N I P Jabatan	: : :	Abdullah Riziki Ardiansyah, S.H., M.H. 19750117 199403 1 001 Ketua
2.		Nama N I P Jabatan	: : :	Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. 19940213 201712 1 002 Hakim
3.		Nama N I P Jabatan	: : :	Febriansyah Rozarius, S.H. 19920211 201712 1 003 Hakim

4.		Nama N I P Jabatan	: : :	Boby Cahyadi, S.H. 19771127 199903 1 003 Panitera
5.		Nama N I P Jabatan	: : :	Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M. 19811229 200604 2 015 Sekretaris
6.		Nama N I P Jabatan	: : :	Lezi Fitri, S.H. 19701120 199603 2 003 Panitera Muda Perkara
7.		Nama N I P Jabatan	: : :	Muhammad Agus, S.E., M.Si. 19850207 200604 1 001 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
8.		Nama N I P Jabatan	: : :	Rosalina, S.E. 19920808 201903 1 004 Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan
9.		Nama N I P Jabatan	: : :	Dendy Prasetya, S. Psi. 19920523 201903 1 005 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
10.		Nama N I P Jabatan	: : :	Zulham Idrus, S. Kom., S.H., M.H. 19830912 201101 1 008 Panitera Pengganti/Plt. Panitera Muda Hukum
11.		Nama N I P Jabatan	: : :	Jonathan Santoso, S.H. 19900618 201903 1 004 Panitera Pengganti

12.		Nama N I P Jabatan	: : :	Yulita Ida Lestari, S.Kom 19860701 202012 2 002 Pranata Komputer Ahli Pertama
13.		Nama N I P Jabatan	: : :	Mohammad Soleh, S.H. 19690430 199503 1 001 Analis Perkara Peradilan
14.		Nama N I P Jabatan	: : :	Fanny Ruspanji, S.E.I 19900412 202012 1 009 Analis Humas
15.		Nama N I P Jabatan	: : :	Fanny Naurita, S.H. 19950222 202203 2 009 Analis Perkara Peradilan
16.		Nama N I P Jabatan	: : :	Fani Melisa Mega Putri Br. Sembiring, A.Md 19950530 202012 2 014 Pengelola Sistem dan Jaringan

Tabel 6. Profil ASN Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Tabel 7. Profil Tenaga PPNPN

No.	NAMA	TUGAS	KET.
1	Imelia Kontesa	Pramubakti diperbantukan di Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	
2	Indah Kusumawati	Pramubakti diperbantukan di Resepsionis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang	
3	Roli	Pramubakti diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan	
4	Agi Munarwansyah	Satpam	
5	Feri	Satpam	
6	Fajar Hidayat	Supir diperbantukan di Sub Bagian Umum dan Keuangan	

D. Isu Strategis

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya di bidang administrasi, organisasi perencanaan dan keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan lingkungan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan perannya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dapat ikut serta mewujudkan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki peran yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau. Peran ini tentunya akan memberikan rasa percaya dan keyakinan publik terhadap peradilan sekaligus mendukung adanya kepastian hukum yang diharapkan semua pihak yang berkepentingan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bertekad untuk meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan peran tersebut demi kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan pada umumnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang khususnya.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2023, dengan bentuk sajian seperti berikut :

BAB I

Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan tentang SAKIP, yang berisikan antara lain; A. Latar Belakang; B. Tugas dan Fungsi; C. Struktur Organisasi; D. Isu Strategis; E. Sistematika Penyajian.

BAB II

Menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam Tahun anggaran 2023 yang berisikan antara lain; A. Perencanaan Strategis 2020-2024; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Program Utama dan Kegiatan; B. Rencana Kinerja Tahun 2023; C. Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2023.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023, menguraikan tentang A. Capaian Kinerja Organisasi (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran kinerja; B. Realisasi Anggaran.

BAB IV

Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta rekomendasi, kemudian Lampiran, yang berisi antara lain Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Perjanjian Kinerja, Matriks Renstra 2020-2024 dan Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP.

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis 2020-2024

Rencana Strategis Pengadian Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2020–2024.

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Adapun visi dari Pengadilan Tata usaha Negara Pangkalpinang adalah:

"Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima Tahun kedepan dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Program Utama dan Kegiatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun anggaran 2023 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. *Program Dukungan Manajemen* Pagu Rp. 4.100.154.000,-
2. *Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara*
   Pagu Rp. 36.175.000,-

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023, pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di awal Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8.
Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	57
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	57
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

Rencana Kinerja Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali reviu/revisi. Reviu pertama dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023 menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan II. Reviu dilakukan atas target indikator kinerja banding, kasasi, dan indeks kepuasan masyarakat sebagai berikut.

1. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding disesuaikan dari 57 menjadi 40.
2. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi disesuaikan dari 57 menjadi 50.
3. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan disesuaikan dari 75 menjadi 80.

Lebih rinci, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 pada tanggal 15 Agustus 2023 dijabarkan dalam Tabel 9 berikut.

Tabel 9.

Reviu Ke I Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat	100

	Penyelesaian Perkara	waktu	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

Kemudian, pada Tanggal 21 November 2023 dilakukan Reviu Ke II atas Rencana Kinerja Tahunan menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III di mana nilai capaian kinerja untuk indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak dapat didefinisikan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk, sehingga perlu dilakukan reviu atau revisi atas indikator dimaksud dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas target indikator lainnya yang telah melebihi target. Perubahan pada Reviu Ke II Rencana Kinerja Tahunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" dihapus dari Indikator Kinerja Utama (IKU) PTUN Pangkalpinang. Hal ini sejalan dengan telah direvisinya PAGU anggaran perkara prodeo yang dialihkan ke pengamanan sidang senilai Rp 775.000,- pada tanggal 26 Oktober 2023.
2. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding disesuaikan menjadi 60.
3. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi disesuaikan menjadi 80.
4. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan disesuaikan menjadi 90.

Lebih rinci, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023 pada tanggal 21 November 2023 dijabarkan dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 10.
Reviu Ke II Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang direviu terakhir pada tanggal 21 November 2023 disampaikan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum, target yang telah ditetapkan di Tahun 2023 berhasil dicapai dengan nilai kinerja yang baik. Nilai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 secara rata-rata adalah sebesar **100,62%**. Nilai 100,62% ini menunjukkan capaian kinerja yang baik dan selaras dengan kualitas perencanaan yang baik. Nilai kinerja untuk tiap-tiap indikator juga menunjukkan capaian minimal 100%.

Jika dibandingkan dengan nilai kinerja pada Tahun 2022, yakni sebesar 156,62%, nilai capaian pada Tahun 2023 sekilas terlihat menurun. Namun, hal ini dikarenakan capaian kinerja Tahun 2022 terlalu tinggi melampaui targetnya dikarenakan tidak dilakukannya reviu atas target kinerja di Tahun 2022. Setelah dikaji, nilai 156,62% ini terlalu besar melampaui target dengan nilai per sasaran adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 146,5%, 2. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 100%, 3. Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan sebesar 316,5%, dan 4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan sebesar 62,5%.

Oleh karenanya, di Tahun 2023, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tiap triwulan, dan dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dilakukan reviu/revisi atas target. Reviu atas target di Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 15 Agustus 2023 dan tanggal 21 November 2023 yang didokumentasikan dalam notulen rapat.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di Tahun 2023 tersebut diuraikan dalam tabel 12.

Tabel 12
Capaian Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60	63,63	106,05
		Persentase Perkara	80	81,81	102,26

		Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	91,55	101,72
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	N/A	100

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada Tabel 10 di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. *Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel*

Pencapaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13

Capaian Kinerja Utama

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60	63,63	106,05
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	81,81	102,26
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	91,55	101,72

a. Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2023 adalah sebesar **100%**. Nilai ini didapat dari perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan jumlah perkara tahun berjalan yang telah diselesaikan. Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan yang tidak

lewat dari 5 (lima) bulan untuk pengadilan tingkat pertama. Selama Tahun 2023, perkara yang masuk adalah sebanyak 12 perkara dan tidak ada perkara sisa dari Tahun 2022. Jumlah perkara yang diselesaikan pada Tahun 2023 adalah sebanyak 11 perkara yang terdiri dari 7 perkara yang diputus dan 4 perkara yang dicabut. Perkara yang diputus tepat waktu/kurang dari 5 bulan adalah sebanyak 11 perkara seperti yang ditunjukkan pada Tabel 15. Keadaan perkara secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 14 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Sisa Thn Lalu	Masuk	Dismissal	Perla wanan	Cabut	Putus	Sisa	Permohonan			
									B	K	P K	Ekse-kusi
GUGATAN												
1	Pertanahan	-	4	-	-	2	2	0	1	1	-	-
2	Kepegawaian	-	2	-	-	-	2	0	2	1	-	-
3	Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Perijinan	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
5	Lelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	HAKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tindakan Faktual/Administrasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10	Pemilukada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Partai Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	KIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
14	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kepala Desa/Perangkat Desa	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
16	Pergantian Antar Waktu (PAW)	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17	Lain-lain	-	3	-	-	1	2	0	-	-	1	-
PERMOHONAN												
1	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		0	12	0	0	4	7	1	4	3	3	-

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah :

1. Sisa Perkara Tahun 2022 : - Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2023 : 12 Perkara
3. Jumlah Putus : 11 Perkara
   - Putus dalam sidang : 7 Perkara
   - Cabut : 4 Perkara
   - Dismissal : - Perkara
4. Sisa Tahun 2023 : 1 Perkara

Gambar 2 Grafik Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Tabel 15 Laporan Perkara Putus Tahun 2023

No	Perkara Putus Tahun 2023			
	Kurang dari 3 Bulan	3-5 Bulan	5-12 Bulan	Lebih dari 12 Bulan
1	4/G//2023/PTUN.PGP	1/G/2023/PTUN.PGP		
2	6/G/2023/PTUN.PGP	2/G/2023/PTUN.PGP		
3	8/G/2023/PTUN.PGP	3/G/2023/PTUN.PGP		
4	12/G/2023/PTUN.PGP	5/G/2023/PTUN.PGP		
5	-	7/G/2023/PTUN.PGP		
6	-	9/G/2023/PTUN.PGP		
7	-	10/G/2023/PTUN.PGP		
	4 Perkara	**7 Perkara**	**-**	**-**

Dari data-data di atas, maka capaian **Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu** dihitung sebagai berikut.

Rumus perhitungan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Rumus perhitungan capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\%}$$

Persentase Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan dengan realisasi mencapai 100%. Penyelesaian perkara pada Tahun 2023 yang sesuai dengan target menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berjalan dengan baik dan tepat waktu.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2023, dari 11 (sebelas) perkara yang diselesaikan, perkara yang dimohonkan banding adalah sebanyak 4 (empat) perkara, sedangkan 7 (tujuh) perkara lainnya tidak dimohonkan banding. Keadaan perkara tingkat banding lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 16 Keadaan Perkara Tingkat Banding

1	Perkara Banding Tahun 2023	:	4 Perkara	Perkara No. 2/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 9/G/2023/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus	:	3 Perkara	Perkara No. 2/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2023/PTUN.PGP
3	Sisa Perkara Banding Tahun 2023	:	1 Perkara	Perkara No. 9/G/2023/PTUN.PGP

Tabel 17. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Satuan Kerja	Perkara Putus	Banding	
			Ya	Tidak
1	PTUN PANGKALPINANG	11	4	7

Dari data di atas, maka capaian **Persentase Perkara TUN yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding** dihitung sebagai berikut.

Rumus perhitungan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{11} \times 100\%$$

$$= 63{,}63\ \%$$

Rumus perhitungan capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{63{,}63}{60} \times 100\%$$

$$= \mathbf{106{,}05\ \%}$$

Persentase Perkara TUN yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 60% dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 63,63%, sehingga diperoleh capaian sebesar **106,05%**. Capaian ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023 telah memuaskan pihak pencari keadilan. Capaian ini juga menunjukkan kualitas perencanaan kinerja yang baik.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) perkara yang dimohonkan kasasi, namun 1 (satu) perkara, yakni perkara Nomor 12/G/2022/PTUN.PGP merupakan perkara Tahun 2022 dan bukan perkara pada tahun berjalan, sehingga tidak dihitung dalam penghitungan persentase perkara kasasi. Adapun dari 11 (sebelas) perkara yang diselesaikan di Tahun 2023, perkara yang dimohonkan kasasi adalah sebanyak 2 (dua) perkara, sedangkan 9 (sembilan) perkara lainnya tidak mengajukan kasasi. Keadaan perkara kasasi lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Keadaan Perkara Kasasi

1	Perkara yang Dimohonkan Kasasi di Tahun 2023	:	3 Perkara		Perkara No. 12/G/2022/PTUN.PGP Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2023/PTUN.PGP
2	Jumlah Putus di Tahun 2023	:	1 Perkara		Perkara No. 12/G/2022/PTUN.PGP
3	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2023	:	2 Perkara		Perkara No. 3/G/2023/PTUN.PGP Perkara No. 5/G/2023/PTUN.PGP

Tabel 19. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No	Satuan Kerja	Perkara Putus	Kasasi	
			Ya	Tidak
1	PTUN PANGKALPINANG	11	2	9

Dari data di atas, maka capaian **Persentase Perkara TUN yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi** dihitung sebagai berikut.

Rumus perhitungan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{9}{11} \times 100\%$$

$$= 81{,}81\ \%$$

Rumus perhitungan capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{81{,}81}{80} \times 100\%$$

$$= \mathbf{102{,}26\ \%}$$

Persentase Perkara TUN yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 80% dari total keseluruhan perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 81,81%, sehingga diperoleh capaian sebesar **102,26%**. Capaian ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023 telah memuaskan pihak pencari keadilan. Capaian ini juga menunjukkan kualitas perencanaan kinerja yang baik.

d. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Indeks kepuasan pencari keadilan adalah suatu indeks yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Survey kepuasan masyarakat dilaksanakan secara berkala per triwulan dengan penilaian terhaadap 9 (sembilan) ruang lingkup pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem Mekanisme/Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 20. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

Indikator	Periode	Indikator	Periode		
	Triwulan I (Januari s/d Maret)		Triwulan II (April s/d Juni)	Triwulan III (Juli s/d September)	Triwulan IV (Oktober s/d Desember)
Fasilitas Pengadilan	79%	Persyaratan	94,32%	83,33%	92,5%
Pendaftaran	100%	Sistem Mekanisme/ Prosedur	94,32%	83,33%	92,5%
Persidangan	89%	Waktu Penyelesaian	88,64%	87,5%	92,5%
Profesional Hakim	100%	Tarif	86,36%	83,33%	82,5%

Pemberian Salinan Putusan	100%	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	87,5%	83,33%	85%
Pelayanan Informasi	89%	Kompetensi Pelaksanaan	90,91%	83,33%	90%
Pelayanan Pengaduan	89%	Perilaku Pelaksana	93,18%	87,5%	90%
Pelayanan Persuratan	100%	Sarana dan Prasarana	90,91%	87,5%	90%
Pengembalian Sisa Panjar	89%	Penanganan, Saran, dan Masukan	96,59%	95,83%	100%
Permohonan Eksekusi	89%				
Aparatur Pengadilan	100%				
Nilai Per Triwulan	98,14%		91,41%	86,11%	90,56%
Nilai Rata-Rata Tahunan		91,55%			

Dari data di atas, maka capaian Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dihitung sebagai berikut.

Rumus perhitungan capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{91{,}55}{90} \times 100\%$

$=$ **101,72 %**

Persentase index kepuasan pencari keadilan rata-rata di Tahun 2023 adalah sebesar 91,55%, dan melebihi target yang telah ditetapkan, ini dikarenakan sepanjang tahun 2023 secara keseluruhan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan.

2. *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*

Pencapaian sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21

Capaian Kinerja Utama

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100

a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Salinan putusan didefinisikan tepat waktu apabila pengadilan telah menyiapkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak perkara diputus. Dari data laporan perkara secara bulanan dapat dihitung persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Dari 11 (sebelas) perkara yang diselesaikan, 11 (sebelas) putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu. Sehingga, hasil perhitungan capaian adalah sebagai berikut.

Rumus Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Disampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

$$= \frac{11}{11} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Rumus Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$= \frac{100}{100} \times 100\%$

$=$ **100 %**

Persentase Salinan Putusan Perkara TUN Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% dari total jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Realisasi jumlah Salinan Putusan Perkara TUN Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%, sehingga diperoleh capaian sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa semua putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023 telah disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22
Capaian Kinerja Utama
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Dihapus		
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Di awal tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menargetkan "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" sebesar 100%, namun kemudian, pada tanggal 21 November 2023 dilakukan Reviu Ke II atas Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Aksi 2023 menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Triwulan III di mana nilai capaian kinerja untuk indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak dapat didefinisikan karena tidak adanya perkara prodeo yang masuk hingga mendekati akhir tahun, sehingga perlu dilakukan reviu atau revisi atas indikator dimaksud dan perlu dilakukan beberapa penyesuaian atas target indikator lainnya yang telah melebihi target. Perubahan pada Reviu Ke II Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Aksi dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" dihapus dari Indikator Kinerja Utama (IKU) PTUN Pangkalpinang. Hal ini sejalan dengan telah direvisinya PAGU anggaran perkara prodeo yang dialihkan ke pengamanan sidang senilai Rp 775.000,- pada tanggal 26 Oktober 2023.
2. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding disesuaikan menjadi 60.
3. Target indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi disesuaikan menjadi 80.
4. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan disesuaikan menjadi 90.

Karena Indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" sudah dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka indikator "Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan" tidak diperhitungkan dalam perhitungan nilai kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di Tahun 2023.

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu (setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum) yang dilayani oleh pengadilan dengan jumlah permohonan layanan hukum yang diajukan dan terdaftar pada register Posbakum.

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang senantiasa tersedia dan memberikan pelayanan maksimal apabila ada kemungkinan masyarakat golongan tertentu yang membutuhkan layanan bantuan hukum. Di tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menargetkan capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar 100%. Berdasarkan laporan pelaksanaan Posbakum tahun 2023, diperoleh jumlah orang yang dilayani dan mendapat bantuan layanan hukum sebanyak 96 orang dari 96 permohonan layanan, atau dengan kata lain semua permohonan layanan hukum selalu dilayani dengan baik oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga nilai capaian dapat dihitung sebagai berikut.

Rumus Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$= \frac{96}{96} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Rumus Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{100}{100} \times 100\%$$

$$= \mathbf{100\ \%}$$

Capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ini sudah sesuai dengan target. Upaya untuk mendorong akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan terus dilakukan dengan menempatkan beberapa *banner* tentang layanan bantuan hukum di dalam gedung kantor agar semakin banyak masyarakat golongan tertentu yang mendapat akses layanan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

4. *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan*

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23
Capaian Kinerja Utama
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	N/A	100

Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

Selama Tahun 2023, tidak ada putusan perkara TUN yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) telah dijalankan oleh para pihak, sehingga tidak memerlukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dikarenakan tidak adanya perkara BHT yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2023, maka tidak ada realisasi atas indikator ini, namun hal ini bukan disebabkan karena kinerja organisasi yang buruk, namun semata-mata dikarenakan tidak adanya input/perkara BHT yang dimohonkan

eksekusi, sehingga nilai capaian atas indikator ini tetap terhitung 100% dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Rumus Perhitungan Realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Sudah BHT dan dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

= N/A

Rumus Perhitungan Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{N/A}{100} \times 100\%$$

= **100 %**

Capaian Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) ini sudah sesuai dengan target, yakni 100%. Tidak adanya permohonan eksekusi ke pangadilan juga mengindikasikan bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) yang dihasilkan oleh pengadilan telah dijalankan oleh para pihak secara sukarela, sehingga tidak memerlukan permohonan eksekusi ke pangadilan. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan telah tercapai.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan Dengan Target Jangka Menengah dan Capaian Tahun-tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dan realisasi tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 24. Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Realisasi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	80%	100%	100%	100%	100%	100%	96,87%	125%	100%	100%
					b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	50%	50%	50%	60%	78,57%	25%	61,54%	200%	63,63%
					c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	100%	50%	50%	50%	80%	78,57%	83,33%	50%	175%	81,81%

					Kasasi										
					d. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	80%	80%	80%	90%	100%	91,74%	108,94 %	115%	91,55%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	50%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	92,3%	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	20%	20%	20%	direvisi	100%	0%	0%	500%	direvisi
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	100%	75%	75%	75%	100%	100%	95,45%	100%	133%	100%

					Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)										
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	10%	10%	10%	100%	0%	0%	0%	62,5%	100%

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah sebesar **100,62%.** Secara umum dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan target kinerja telah tercapai dan ada beberapa indikator yang melebihi target. Nilai kinerja sebesar 100,62% ini menunjukkan bahwa semua target yang ditentukan telah tercapai dan sejalan dengan perencanaan kinerja yang ditentukan di tahun 2023.

Tabel 25. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Capaian Kinerja Tahun 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Upaya Perbaikan yang Telah/Akan Dilakukan
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	100	100	Nilai capaian 100% sesuai dengan targetnya ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Hal ini dikarenakan segenap warga PTUN	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						Pangkalpinang, terutama Hakim dan Bagian Kepaniteraan berusaha keras untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk tepat waktu dan tidak melebihi 5 bulan. Hal ini juga dapat dicapai berkat sinergi yang baik dengan Tim Kesekretariatan yang menyediakan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kinerja Bagian Teknis Kepaniteraan dan Hakim.	
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	60	63,63	106,05	Nilai realisasi yang melebihi targetnya ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Hal ini	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						menunjukkan para pihak pencari keadilan telah puas dengan putusan yang dihasilkan, terbukti dengan tercapainya target nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang sejalan dengan perencanaan. Keberhasilan ini diperoleh karena PTUN Pangkalpinang selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam memutus perkara secara adil dan transparan.	
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	81,81	102,26	Nilai realisasi sebesar 81,81% yang melebihi targetnya ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Hal ini menunjukkan para pihak	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						pencari keadilan telah puas dengan putusan yang dihasilkan, terbukti dengan tercapainya target nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang sejalan dengan perencanaan. Keberhasilan ini diperoleh karena PTUN Pangkalpinang selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam memutus perkara secara adil dan transparan.	
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	91,55	101,72	Nilai realisasi 91,55% yang melebihi targetnya ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Hal ini menunjukkan para pihak pencari keadilan dan para	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						stakeholders telah puas dengan layanan yang diberikan, di antaranya layanan petugas PTSP, layanan akses terhadap produk pengadilan, dan layanan sarana dan prasarana. Keberhasilan meraih indeks prestasi yang memuaskan ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antar setiap bagian untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, baik dari sisi Hakim, Kepaniteraan, maunpun Kesekretariatan. Bagian Kepaniteraan, khususnya PTSP terus melakukan upaya meningkatkan layanan yang cepat, ramah, dan informatif. Hal ini ditunjang dengan	

						bimbingan, *briefing* pagi PTSP, dan monitoring serta evaluasi berkala dari Ketua. Demikian pula dengan Bagian Kesekretariatan yang terus berusaha untuk mendukung pemenuhan fasilitas publik, mulai dari ruang sidang yang nyaman, TV, ketersediaan mesin antrian sidang, kotak *charge* ponsel, dan lain-lain.	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	Nilai realisasi 100% sesuai dengan targetnya ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Hal ini dikarenakan segenap warga PTUN Pangkalpinang, terutama Bagian Kepaniteraan berusaha keras untuk mengirimkan	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						salinan putusan kepada para pihak tepat waktu.	
3	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	Nilai realisasi 100% ini menunjukkan keberhasilan PTUN Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis dimaksud. Semua pihak pencari keadilan golongan tertentu dipastikan akan mendapat pelayanan layanan bantuan hukum dari Posbakum. Ketua pengadilan melalui Kepaniteraan Hukum dalam hal ini terus melakukan monitoring dan evaluasi layanan Posbakum secara berkala untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.
3.	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Putusan Perkara	100	N/A	100	Selama tahun 2023, tidak ada putusan perkara TUN yang	Capaian telah optimal. PTUN Pangkalpinang terus bertekad

	terhadap Putusan Pengadilan	TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)				Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) telah dijalankan oleh para pihak, sehingga tidak memerlukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dikarenakan tidak adanya perkara BHT yang dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama tahun 2023, maka tidak ada realisasi atas indikator ini, namun hal ini bukan disebabkan karena kinerja organisasi yang buruk, namun semata-mata dikarenakan tidak adanya input/perkara BHT yang	untuk mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

						dimohonkan eksekusi, sehingga nilai capaian atas indikator ini tetap terhitung 100%. Capaian Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) ini sudah sesuai dengan target, yakni 100%.	

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja PTUN Pangkalpinang yang baik tidak terlepas dari kualitas pelaksanaan anggaran yang diupayakan untuk terus mendukung tujuan organisasi dalam mencapai sasarannya. Anggaran yang dikelola dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan mengutamakan pelayanan yang berkualitas untuk mendukung ketercapaian tujuan organisasi. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dijabarkan dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) berikut ini.

Tabel 26. IKPA DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	015	005	401968	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	87.91	95.96	87.14	100.00	95.86	100.00	100.00	96.28	100%	96.28
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.79	19.19	8.71	10.00	9.59	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	93.96		95.79					100.00			

Nilai IKPA DIPA 01 Badan Urusan Administrasi PTUN Pangkalpinang menunjukkan nilai akhir 96,28 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran dan capaian output masing-masing sebesar 95,96 dan 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya secara riil. Ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran tidak lagi dipusatkan hanya pada penyerapan anggaran, tetapi lebih berfokus pada penyerapan anggaran yang berkualitas, di mana penyerapan anggaran tersebut dapat menghasilkan output sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran ini juga telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 95,96, diperoleh hasil/output yang maksimal, yakni senilai 100%.

Tabel 27. IKPA DIPA 05 DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	015	005	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	83.82	94.48	0.00	0.00	98.96	100.00	100.00	77.17	80%	96.47
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.38	18.90	0.00	0.00	9.90	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.91		97.81					100.00			

Nilai IKPA DIPA 05 Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara PTUN Pangkalpinang menunjukkan nilai akhir 96,47 dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 94,48 dan capaian output sebesar 100. Hal ini menunjukkan penyerapan anggaran yang maksimal selaras dengan nilai pencapaian outputnya. Ini menandakan bahwa pengelolaan anggaran tidak lagi dipusatkan hanya pada penyerapan anggaran, tetapi lebih berfokus pada penyerapan anggaran yang berkualitas, di mana penyerapan anggaran tersebut dapat menghasilkan output sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran ini juga telah mencerminkan efisiensi di mana dengan nilai kualitas penyerapan anggaran sebesar 94,48, diperoleh hasil/output yang maksimal, yakni senilai 100%.

B. Realisasi Anggaran

Total anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.136.329.000,- dengan realisasi anggaran total sebesar Rp. 4.060.053.616,- atau sekitar 98,15%. Anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

1. DIPA Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Urusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
Program Dukungan Manajemen						
1.	Belanja Pegawai	3.315.521.000	2.610.742.000	2.540.905.486	69.836.514	97,34%
2.	Belanja Barang	1.208.789.000	1.343.789.000	1.339.068.130	4.720.870	99,65%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung						
1.	Belanja Modal	15.000.000	145.623.000	143.908.000	1.715.000	98,82%
Jumlah		**4.539.310.000**	**4.100.154.000**	**4.023.881.616**	**76.272.384**	**98,15%**

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 01

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti Pengamanan Sidang dan Pelayanan Pos Bantuan Hukum. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Ket
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)						
1.	Belanja Barang	36.175.000	36.175.000	36.172.000	3.000	99,99%

Tabel 29. Realisasi Anggaran DIPA 05

Realisasi anggaran tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 98,15%. Capaian realisasi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp 13.143.459.017 (96,33%). Tingginya penyerapan anggaran tahun 2023 menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik dan selaras dengan peningkatan kinerja organisasi. Lebih rinci perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No.	Program	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran			
		2022	2023	2022		2023	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	13.406.212.000	4.100.154.000	13.108.304.025	97,78%	4.023.881.616	98,15%
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	37.050.000	36.175.000	35.154.992	94,89	36.172.000	99,99%
	Jumlah	**13.443.262.000**	**4.136.329.000**	**13.143.459.017**	**96,33**	**4.060.053.616**	**98,15%**

Selama tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang menyebabkan perubahan PAGU anggaran sebesar Rp 439.156.000,- dari anggaran semula sejumlah Rp 4.539.310.000,- menjadi Rp 4.100.154.000,-. Sedangkan untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, telah dilakukan 3 (tiga) kali revisi anggaran dalam hal PAGU anggaran tetap, namun menghapus 1 (satu) Rincian Output, yakni Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dengan pergeseran anggaran ke Rincian Output Pelaksanaan Pengamanan Sidang sebesar Rp 775.000,-.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

BAB IV
PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

BAB IV
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2023. Pada laporan kinerja tahun ini, ada perbedaan nilai kinerja yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan nilai kinerja pada tahun 2022 yang jika dilihat sekilas lebih rendah dari capaian di tahun 2022, namun hal ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja, namun karena adanya reviu peningkatan target capaian kinerja untuk menciptakan laporan kinerja yang lebih andal dan akuntabel.

Secara umum, kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang di tahun 2023 sudah optimal dan berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan dengan nilai kinerja 100,62. Selama tahun 2023, juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk memantau kualitas kinerja yang dihasilkan.

Sangat disadari bahwa perlu terus dilakukannya peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan yang profesional, efektif, efisen, dan bersih. Pengukuran kinerja yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan kinerja yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan kinerja tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat ukur kinerja yang andal dan akuntabel, serta dapat memberikan informasi terkait pencapaian kinerja di tahun 2023 untuk bahan evaluasi di tahun-tahun mendatang.

B. Rekomendasi

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja telah sangat baik dan melebihi nilai 100%. Kiranya capaian ini perlu dipertahankan dan dapat menjadi suatu pertimbangan untuk meningkatkan target capaian kinerja di tahun yang akan datang.

Selain itu, realisasi anggaran Posbakum yang baik merupakan suatu capaian atas usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang untuk memberikan sosialisasi mengenai layanan pos bantuan hukum terus menerus agar masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat memanfaatkan layanan ini. Diharapkan usaha ini akan terus ditingkatkan di tahun mendatang untuk peningkatan capaian yang lebih baik.

Adapun kiranya juga dapat dilakukan sosialiasi yang lebih baik dan tuntas tentang LKjIP kepada jajaran lembaga peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana mestinya. Selain itu, diharapkan adanya pemberian piagam penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat LkjIP yang lebih baik lagi.

PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. *SK Tim Penyusunan LKjIP*

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 69 /KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Peradilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai salah satu Instansi Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada publik dibidang Hukum;
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan capaian kinerja yang terukur dan akuntabel, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, perlu menyampaikan laporan tahunan sebagai bentuk pertangungjawaban terhadap publik sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim penyusun laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 sebagai salah satu dokumen SAKIP atau LAPTAH sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun 2023 melalui lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia;
d. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2023

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKJIP) PTUN PANGKALPINANG TAHUN 2023;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 783/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/XII/2023 tentang TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2023;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.(LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2023;

KETIGA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) PTUN Pangkalpinang Tahun 2023 tersebut melaksanakan tugas mengumpulkan dan mengevaluasi sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen Laporan Pelaksanana Kegiatan Tahunan (LAPTAH) PTUN Pangkalpinang Tahun 2023
2. Menyusun dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
4. Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023,2024 dan 2025;
5. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024;
6. Menyusun Kegiatan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024:
7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai dokumen SAKIP.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 29 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

RONI ERRY SAPUTRO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NOMOR 65 /KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/1/2024
TANGGAL 29 Januari 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	JABATAN	NAMA / NIP	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. NIP.19770628 200112 1 003	Penanggung Jawab Tim
2.	Koordinator Validasi Data	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H NIP.19800502 200312 1 001	Koordinator Validasi Data
3.	Ketua	ANDI MADERUMPU, S.H., M.H NIP.19800502 200312 1 001	Ketua Tim
4.	Sekretariat	DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E.., M.M NIP. 19811229 200604 2 015	Sekretaris Tim
5.	Anggota	ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. NIP. 19730415 200604 1 002 ROSALINA , S.E. NIP. 19920808 201903 2 017 YULITA IDA LESTARI, S.Kom NIP. 19860701 202012 2 002	Tim Penyusun & Penanggung Jawab Data/Informasi
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	BOBY CAHYADI, S.H. NIP. 19771127 199903 1 003 LEZI FITRI, S.H. NIP. 19701120 1996032 003 M. AGUS, S.E., M. Si. NIP. 19850207 200604 1 001 DENDY PRASETYA, S.Psi NIP. 19920523 201903 1 005	- Ketua Tim - Anggota - Anggota - Anggota

KETUA,

RONI ERRY SAPUTRO

2. Struktur Organisasi

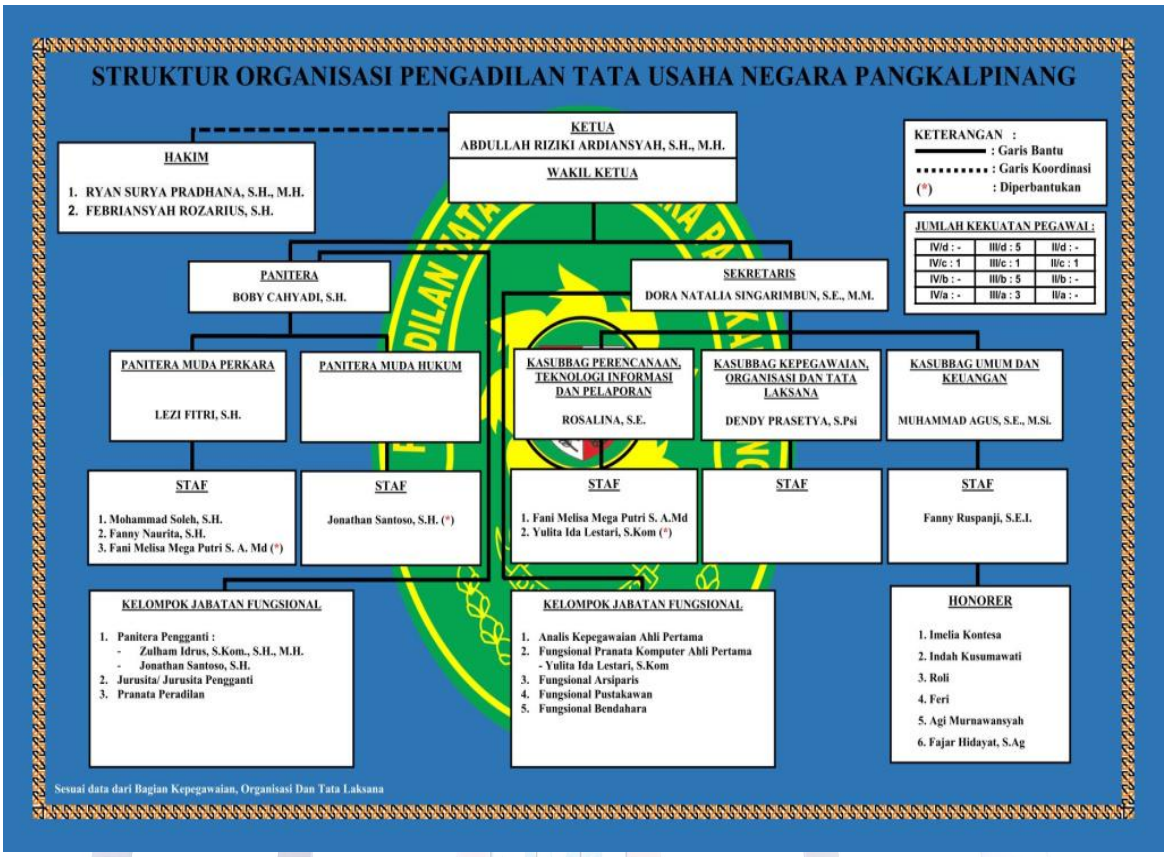

KETERANGAN : ------ ***= GARIS KOORDINASI***

——— ***= GARIS TANGGUNG JAWAB***

3. *Indikator Kinerja Utama*

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	**Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu** / **Jumlah perkara yang diselesaikan** **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	**Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi** / **Jumlah Perkara yang diselesaikan** **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		c. Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	**Index Kepuasan Pencari Keadilan** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan

4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	**Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu** / **Jumlah Putusan** **100%** **Catatan :** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	**Direvisi/dihapus melalui Reviu IKU tanggal 21 November 2023**		

6.		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum** / **Jumlah permohonan layanan hukum** **100%** **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	**Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindak lanjuti** / **Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT** **100%**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat. • Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.		

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEPANITERAAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{11}{11}$ x 100 % = **100** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{7}{11}$ x 100 % = **63, 63** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{9}{11}$ x 100 % = **81, 81** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan	**91,55%**	Panitera	Laporan Triwulan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{11}{11}$ x 100 % = **100** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi	a. Persentase Perkara Prodeo	Dihapuskan	Dirjen Badilmiltun, Panitera	Laporan Bulanan dan

	masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang Diselesaikan (Dihapus dari PK 2023)			Laporan Tahunan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{96}{96}$ x 100 % = **100** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{0}{0}$ x 100 % = **100** %	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

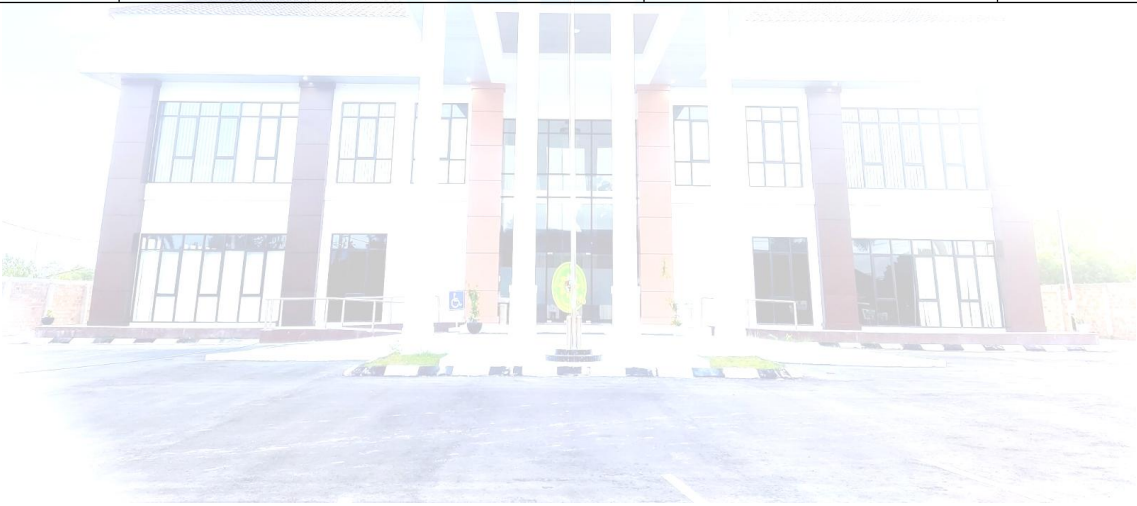

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KESEKRETARIATAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Program Peningkatan Kualitas SDM	a. Jumlah pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
		b. Jumlah pegawai yang lulus diklat non yudisial	b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan / ber sertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, dengan jumlah yang mengikuti diklat.	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.
			b. 2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan	Ketua Pengadilan	Laporan Tahunan.

			jumlah yang mengikuti diklat.		
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	a. Tersedianya kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Perbandingan penyelesaian laporan pelaksanaan anggaran sesuai standar	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Optimalnya penyerapan anggaran	Jumlah rencana penyerapan anggaran dengan realisasi anggaran yang terserap secara riil	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pengadilan	Prosentase sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

4. *Matriks Rencana Strategis Tahun 2020-2024*

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung

Misi :
1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta Modern
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Strategi				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Ribuan)
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat	Persentase para pihak yang	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan	1. Jumlah Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu 2. Jumlah Perkara yang	100%	-

	terhadap sistem peradilan melalui proses peadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	percaya terhadap sistem peradilan		Transparan dan Akuntabel	Tepat waktu						Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Tata Usaha Negara	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 4.Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		
					b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	50%	50%	60%	40%					
					c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	50%	50%	80%	50%					
					d. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	80%	80%	90%	80%					

2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	20%	20%	20%	-	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	-	Rp 510
			100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan	75%	75%	75%	100%	100%			2. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Rp.33.000

					Hukum (Posbakum)										
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	10%	10%	10%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	-

5. *Pengukuran Kinerja*

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	**a.** Persentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	60%	63,63%	106,05%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	81,81%	102,26%
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	91,55%	101,72%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	dihapuskan		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti.	100%	N/A	100%

6. Penghargaan Yang Diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2023

Pada Tahun 2023, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berhasil meraih Juara III Kategori Pelaporan Perkara Peradilan Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2023.

Gambar 3

Piagam Penghargaan Juara Ke 3 Kategori Pelaporan Perkara Peradilan